

MEWUJUDKAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI PADA TINGKAT SATUAN OPERASIONAL

Oleh :
Agus Setyarso

*Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia (PERSAKI)
Cabang Yogyakarta
Yogyakarta*

Pengelolaan Hutan Lestari, Pengalaman di P. Jawa

Istilah lestari atau berkelanjutan, selalu menjadi bagian dari konsep kehutanan yang universal. Konsep ini bermula dari kelestarian hasil, yang bisa diukur berdasar panen yang sama, panen yang tidak menurun, atau panen yang progresif dari tahun ke tahun. Deklarasi Kaliurang 1966 menelurkan landasan idiil rimbawan, yang salah satunya berisi pengertian keseimbangan antara azas manfaat dan azas kelestarian pada pengelolaan hutan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas. Di sini sebenarnya sudah terkandung tiga aspek, yakni hasil, lingkungan dan sosial.

Pengelolaan hutan kemudian diarahkan untuk ukuran kelestarian tersebut. Di Jawa, ini selalu ditandai oleh tersusunnya kawasan hutan dalam penataan menurut kesatuan-kesatuan pengelolaan, dan oleh rencana jangka panjang, yang menjadi panutan kegiatan pengelolaan fisik terhadap sumberdaya hutan di lapangan. Disiplin pengelolaan terhadap rencana ditunjukkan oleh catatan kegiatan (register) yang mendampingi dokumen perencanaan. Lembaga perencanaan dan mekanisme kegiatannya telah menjadi perangkat *built in control* yang efektif dalam sistem pengelolaan. Jika disiplin dipertahankan, kelestarian dapat diwujudkan, begitu hipotesisnya.

Chaos pada sistem pengelolaan hutan di Jawa kemudian terjadi. Bukan saja kedisiplinan kurang dapat dipertahankan, tetapi tekanan eksternal masuk ke dalam sistem secara bertubi-tubi. Pertama yang dapat disebutkan adalah tekanan permintaan hasil hutan (atau tekanan untuk mendapatkan penghasilan sebesar-besarnya ?), yang berakibat pada intensifikasi masa benah hutan alam jati menjadi hutan tanaman. Berikutnya adalah situasi kemiskinan yang ditandai dengan lapar lahan pada masyarakat pedesaan, yang membawa isu sosial menjadi lebih berat pada sistem pengelolaan. Yang terakhir muncul adalah isu konversi lahan hutan untuk kepentingan industri serta tuntutan kawasan hutan untuk lebih berperan dalam mengendalikan tata air dan erosi di Jawa.

Tekanan eksternal yang begitu berat memaksa sistem pengelolaan hutan konvensional tidak mampu lagi secara efektif mewujudkan azas kelestarian.

Pengelolaan Hutan Alam Produksi (di Luar P. Jawa)

Tidak seperti pengelolaan hutan di Jawa, runtutan pengelolaan hutan alam produksi di luar Jawa tidak dimulai dari pentaan kawasan hutan. Artinya, tidak dimulai dengan penetapan kesatuan-kesatuan pengelolaan. Artinya, pada awalnya unit kelestarian memang *ill defined*. Hak pengusahaan hutan diberikan tanpa dasar penataan yang serius. Situasi ini berlangsung sejak awal dekade 70 sampai awal dekade 90, atau 20 tahun.

Setelah melewati masa 20 tahun dengan cara pemberian HPH seperti itu, sangat sedikit orang yang masih ingat dan sadar bahwa hal tersebut seharusnya bersifat interim, atau sementara, atau mengandung pesan untuk disiapkan cara yang lebih baik dan permanen sifatnya.

Barangkali kesementaraan kebijaksanaan pemberian HPH banyak diakibatkan oleh kebutuhan akan devisa non migas yang mendesak. Barangkali kewajiban mendirikan industri bagi setiap HPH juga bersifat sementara. Barangkali kapasitas industri yang kemudian melebihi kapasitas panen bahan baku hanya merupakan akses kesementaraan itu. Barangkali pengaturan kuota ekspor juga bersifat sementara. Barangkali kewajiban HPH Bina Desa juga bersifat sementara. Barangkali sistem TJTI juga sementara, sambil membantu mengatasi kekurangan pasok bahan baku. Barangkali, dan masih banyak barangkali yang lain.

Banyak sekali faktor eksternal yang mendikte perlakuan terhadap hutan alam produksi. Sampai akhirnya, orang sulit mengenal lagi seperti apa seharusnya bentuk pengelolaan hutan alam yang 60 juta hektar itu. Sampai akhirnya, penggarapan hutan alam produksi dapat dilakukan hampir oleh siapa saja, tidak harus rimbawan. Pada saat semua sektor bertemu di BAPPEDA Propinsi untuk membicarakan rencana tataruang wilayah maka kehutanan sangat sulit membawa isu kelestarian sumberdaya hutan bagi lingkungan, karena segala pengalamannya masih berstatus sementara.

Lalu tiba-tiba, semua disentakkan oleh kewajiban setiap HPH untuk mewujudkan pengelolaan hutan berkelanjutan. Pengelolaan hutan yang diminta bukan lagi sebatas kelestarian hasil. Semua bentuk eksternalitas diminta untuk diinternalisasikan ke dalam sistem pengelolaan. Sistem pengelolaan hutan, oleh karenanya, harus dapat menjamin kelestarian dalam multi faset, yaitu :

- (i) Kelestarian sumberdaya, yang ditandai oleh kriteria *resources security*.
- (ii) Kelestarian hutan dan kelestarian hasil hutan, yang ditandai oleh perencanaan dan pengaturan hasil hutan yang sesuai dengan dinamika tegakan.
- (iii) Kelestarian fungsi lingkungan, yang ditandai oleh konservasi keragaman hayati dan perlindungan tata air dan erosi.

- (iv) Kelestarian manfaat bagi masyarakat setempat, yang ditandai dengan besarnya partisipasi masyarakat pada pengelolaan serta sumbangan hasil pengelolaan untuk kehidupan setempat (perekonomian lokal).

Strategi Mencapai Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari

Permasalahannya jelas dan oleh karenanya pada kesempatan ini tidak perlu diuraikan panjang lebar. Di satu sisi adalah situasi pengelolaan HAP yang sampai saat ini bersifat interim dan di sisi lain ada *guidelines* yang menuntut internalisasi semua eksternalitas pada sistem pengelolaan hutan. Jarak antara *what is* dan *what ought to be* begitu lebar. Strategi yang harus dirumuskan dan dilaksanakan semestinyalah mempunyai kemampuan menyempitkan jarak tersebut.

Lebarnya jarak antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya membuat *action space* untuk pemilihan strategi yang lebar pula. Ini menguntungkan sekaligus menyulitkan. Menguntungkan karena tersedia pilihan strategi yang cukup banyak pada *action space* tersebut dan menyulitkan karena orientasi strategi sangat mudah bergeser, atau bahkan kehilangan arah.

Dalam mengatasi dilema tersebut ditawarkan pendekatan *stagewise*. Jarak yang lebar dibagi ke dalam beberapa *stages*, atau tingkatan dan kemudian strategi dioptimalkan pada tiap-tiap *stage*, tanpa mengabaikan kepentingan dan keterkaitan antar *stages*. *Stages* yang ditawarkan adalah sebagai berikut :

- a. Prakondisi
- b. Transisi
- c. Pembinaan
- d. Regulasi SFM

Pada tingkatan prakondisi, obyeknya adalah pemerintah, yakni dimulai dengan suatu *political will* dan diikuti oleh *political commitment* untuk merubah status interim pengelolaan HAP menjadi status lestari. Orientasi untuk memak-simumkan produksi kayu bulat harus diganti dengan orientasi pembinaan produktivitas sumberdaya hutan.

Pada tingkatan transisi, permasalahan paling kritis yang harus diselesaikan adalah mengubah institusi di lapangan dari tatanan sekarang ke tatanan institusi yang mendukung tercapainya SFM. Obyek garapannya adalah pelaksana lapangan dan aparat daerah. Berlakunya otonomi daerah diperkirakan akan menambah kompleksitas tingkatan transisi ini.

Pada tingkatan pembinaan, sistem pengelolaan hutan harus dipahami pada segala komponennya. Segala teknis pengelolaan hutan dan bisnis kehutanan menjadi obyek garapan terpenting. Keduanya adalah perangkat yang diperlukan untuk membawa sistem pengelolaan pada sumberdaya hutan sebagai bisnis kehutanan yang sehat. Internalisasi faktor-faktor eksternal dicari strateginya di sini.

Pada tingkat regulasi SFM tatanan pengendalian dalam bentuk pemantauan dan evaluasi menjadi fokus garapan. Tingkat regulasi diartikan sebagai tingkat pada saat prinsip-prinsip SFM secara sistematis sudah dapat diwujudkan.

Strategi yang Diusulkan pada Tingkatan Prakondisi

Prakondisi berfungsi sebagai *the necessary condition* sebelum strategi SFM dapat diterapkan. Pada saat sekarang persoalan besar yang dihadapi terletak pada tingkatan ini. Strategi yang diusulkan pada tingkatan ini adalah :

- a. Peningkatan keterbukaan komunikasi antara pengambil keputusan dengan pihak-pihak yang berminat menyumbangkan pemikiran dan tenaganya bagi SFM. Hasil yang diharapkan adalah perubahan sikap (*attitude*) pengambil keputusan dan masyarakat dari sikap penambangan (*logging*) kepada sikap pengelolaan (optimasi produktivitas sumberdaya hutan). Perbedaan istilah antara logging dan TPTI diharapkan tidak terjadi lagi.
- b. Tatanan HPH hendaknya diganti dengan tatanan KPHP. KPHP adalah satuan kawasan dan aktivitas kehutanan yang memang disiapkan untuk menampung dan melaksanakan SFM secara utuh. Penataan hutan dilakukan dengan sebenarnya memperhatikan sistem lahan hutan, kelas perusahaan, perilaku lingkungan, dinamika sosial masyarakat dan kepentingan ekonomi. Enclave kawasan lindung/konservasi dan enclave sosial dirancang sebagai partner pengelolaan, bukannya sebagai barrier atau isolasi. Blok-blok tebangan dihapus, diganti dengan organisasi kawasan teritorial menurut bagian hutan dan pusat-pusat kegiatan yang terdistribusi di seluruh areal kerja. Hasil yang diharapkan adalah sekuritas sumberdaya yang lebih baik, kelestarian hutan yang teratur dan basis pengelolaan hutan yang mantap.
- c. Tidak ada lagi penyeragaman petunjuk teknis secara nasional. Setiap wilayah, propinsi, DAS, mempunyai karakteristik tersendiri. Pengembangan sumberdaya dan pengelolaan hutan harus didasarkan pada spesifikasi yang ada. Hasil yang diharapkan adalah tersebarnya pengembangan kehutanan menurut wilayah dan optimasi potensi sumberdaya hutan, yang berakibat pada optimasi sumbangan kehutanan pada ekonomi regional.
- d. Penghentian subsidi hutan pada industri. *Stumpage value* hendaknya ditinjau secara seimbang antara *stumpage cost* dan *stumpage price*. Berapa yang harus dikembalikan ke hutan harus dihitung. Hasil yang diharapkan adalah penghargaan yang wajar terhadap hasil hutan. Struktur harga log beserta perilakunya ditinjau kembali.
- e. Tatanan paket kebijaksanaan kehutanan harus ditinjau kembali, sejak dari Undang-Undang Pokok Kehutanan sampai dengan edaran Dirjen atau bahkan Kanwil. Sekarang ini, tidak seorangpun yang berani menjamin bahwa tidak ada inkonsistensi atau bahkan konflik di antara paket-paket kebijaksanaan

tersebut. Kebijakan-kebijaksanaan hendaklah disusun berdasar *policy research* yang sistematis. Instrumen untuk pelaksanaan kebijakan harus ditegaskan. Jangan sampai terjadi lagi Dinas Kehutanan yang mengurus puluhan HPH dengan total luas lebih dari 4 juta hektar, yang terletak di antara empat sungai besar, hanya memperoleh satu speedboat dan gaji PNS. Hasil yang diharapkan adalah efektifnya kebijakan, dalam artian mempunyai *implementability* yang tinggi.

- f. Kesatuan-kesatuan *small holder forestry* hendaknya bisa dirumuskan. Hutan-hutan rakyatpun akan harus dikelola secara berkelanjutan. *Ecolabeling* berlaku pada sistem pengelolaan hutan yang manapun. Hasil yang diharapkan adalah tertatanya hutan rakyat sebagai pendamping KPHP.

Strategi yang Diusulkan pada Tingkatan Transisi

- a. Peningkatan institusi di daerah disertai dengan pemberdayaan fungsinya. Tatanan institusi di daerah di sektor kehutanan sekarang ini lebih banyak diarahkan untuk kepentingan pengawasan dan bersifat kepanjangan tangan pusat di daerah. Secara fungsional, institusi daerah tidak disiapkan untuk mengurus dan melayani SFM. BIPHUT misalnya, mestinya dikembalikan pada fungsi penataan dan perencanaan hutan dan bukannya terbatas pada pemancangan batas dan *checking cruising*. Hasil yang diharapkan dari strategi ini adalah mekanisme yang runtut dan obyektif antara perencanaan, pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian. Jangan lupa bahwa *internal inspection* merupakan bagian dari ISO 9000 dan oleh karenanya harus menjadi bagian ekolabel.
- b. Peningkatan dan pemberdayaan institusi pelaksana KPHP. Pada masa transisi, para pemegang HPH dapat diperlakukan sebagai mitra dalam melaksanakan SFM, jika suatu KPHP terdiri dari lebih dari satu kawasan HPH. Jika suatu KPHP hanya terdiri dari satu kawasan pemegang HPH, maka pada masa transisi institusi dan sumberdaya rimbawan harus dibenahi untuk nantinya mengambil peran sebagai pengelola KPHP.
- c. Oleh karena swasta akan dipertahankan sebagai mitra dan pelaksana SFM, maka pemilik (pemegang saham dominan) dan keluarga pemilik perusahaan hendaknya memperoleh pendidikan (bukan sekedar latihan) cinta lingkungan. Hasil yang diharapkan adalah perubahan visi pengusaha dari *money makers* menjadi *national forest entrepreneurs*, sehingga melancarkan dukungan terhadap pelaksanaan SFM.
- d. Peningkatan kualitas sumberdaya rimbawan di Dati II. Pada era otonomi daerah, peran Dati II akan sangat menonjol. Dilihat dari situasinya sekarang, usulan untuk meningkatkan kualitas rimbawan kiranya tidak berlebihan. Hasil yang diharapkan adalah dukungan penuh SFM, baik pada KPHP maupun satuan hutan rakyat, dari jajaran Dati II.

Strategi yang Diusulkan pada Tingkatan Pembinaan

Sistem SFM dapat dilihat dari 4 komponen utama, yakni : komponen bisnis, komponen pengaturan kegiatan, komponen silvikultur dan komponen perlindungan/konservasi sumberdaya hutan. Strategi berikut diusulkan berdasar pembagian komponen tersebut.

- a. Pada komponen bisnis, diperlukan pembinaan kemitraan bisnis yang lebih terbuka/profesional, di samping di antara pelaku bisnis di dalam unit pengelolaan, juga dengan kesertaan masyarakat setempat. Hasil yang diharapkan adalah akses dan pemanfaatan peluang bisnis yang efektif tetapi wajar.
- b. Unit pengelolaan harus dibina menjadi unit bisnis yang mandiri, di dalam artian bahwa keputusan bisnis dapat diselesaikan di tingkat unit tersebut. Hasil yang diharapkan adalah bahwa dari sisi kelestarian usaha, unit tersebut meningkat keajegannya.
- c. Komponen pengaturan kegiatan harus didasarkan pada spesifikasi dan dinamika sumberdaya hutan yang ada pada unit yang bersangkutan. Pengaturan hasil misalnya, harus didasarkan pada informasi mengenai pertumbuhan dan perkembangan hutan, dan dinyatakan dalam bentuk *harvest schudeling*, tidak hanya sekedar AAC dan JPT. Pusat-pusat tebang harus ditentukan dengan mengingat karakteristik ekosistem dan penguasaan teritorial. Hasil yang diharapkan adalah jaminan atas kelestarian sumberdaya, di samping kelestarian hasil.
- d. Antara berbagai metoda silvikultur, hendaknya dapat saling mengisi, tidak perlu kaku dalam bentuk HTI-TPTI. *Stand management* disusun berdasar petak sebagai satuan terkecilnya. Hasil yang diharapkan adalah terbentuknya struktur tegakan yang optimal sesuai dengan kesesuaian tempat tumbuh dan kelas perusahaan.
- e. Perlindungan hutan yang paling kritikal adalah mencegah terjadinya tebangan yang menyimpang dari rencana. Diusulkan untuk selalu dapat mencermati dinamika *unregulated harvest* tersebut serta menyiapkan strategi untuknya. Tidak ada satu strategipun yang dapat dibuat seragam pada aspek ini.
- f. Dalam hal konservasi keragaman hayati, petak-petak khusus dapat disiapkan. Di petak-petak reguler, tingkat keragaman harus dibatasi sampai ambang, agar produktivitas sumberdaya niagawi dapat dimaksimumkan.
- g. Strategi lain yang mempengaruhi kinerja pengelolaan adalah pembinaan sumberdaya manusia. Situasinya sekarang ini adalah bahwa mereka yang bekerja di perusahaan pemegang HPH jarang yang mendapati dirinya pada alur penjenjangan karir yang jelas. Karir, sebagaimana diketahui, merupakan salah satu faktor yang menentukan motivasi dan pada gilirannya motivasi akan menentukan etos kerja.

Penutup

Semua strategi yang diusulkan di atas tidak mudah untuk dilaksanakan. Yang pertama, orang tidak mudah memahami bahwa mencapai SFM adalah *urgent*, dan bahkan sudah mendesak. Kedua, orang tidak biasa mengambil inisiatif untuk bersama-sama (*sharing*) mengambil tanggung jawab. Yang seterusnya, visi ke depan rimbawan telah banyak diperpendek oleh situasi yang membingungkan, mengambang dan kadang-kadang menyilaukan.

Jadi, pelatihan teknis saja tidak cukup. Apalagi pelatihan yang hanya ditujukan untuk menghadapi angka keramat tahun 2000. Strategi dakwah lingkungan barangkali bisa membantu. Itupun jika beberapa di antara kita masih bisa *concern* dan *commit* atas hal-hal yang terjadi pada sumberdaya hutan Indonesia di masa mendatang. Pada ulang tahun ke 50 kemerdekaan negara ini, usulan kami bagi para rimbawan adalah : prihatin dan tirakat.